

GLOBALISASI DAN AKSES PENDIDIKAN UNTUK RAKYAT MISKIN

Hudan Mudaris

Dosen dan peneliti pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Yogyakarta
(STITY) Wonosari; hudan286@yahoo.com

Abstract

Education is a vehicle for human beings to increase their critical capacities and to make their life is better than before. Education, ideally, becomes a productive force, i.e., a medium for social transformation and social class mobilization. In the sense that, through education, students from middle-lower class family are possible to transcend their social class position when they are adult. However, this kind of idealistic view is not compatible with what happening in reality. Education, in the era of globalization, tends to be divided into two sharp positions: elite education for elite people and ordinary education for ordinary people. The statements of "education for all" and "all children have right for qualified education" are easy to formulate but difficult to make them come into existence. The author argues that globalization makes poor people are more difficult to have access to qualified education. If we perpetuate this situation means that we agree that education is only for social class reproduction, not for social class transformation.

Kata kunci: globalisasi, kebijakan negara, pendidikan untuk semua

I. Pendahuluan

Menjadi manusia bukanlah sekedar proses alami, melainkan proses kultural (budaya), yang dijalankan dalam dan melalui pendidikan. Sebab yang dikenai dengan sifat manusiawi (*humanus*) bukan sekedar spesiesnya, melainkan geniusnya. Oleh karena itu sejarah peradaban manusia tidak lain adalah sejarah pendidikan, bagaimana manusia menjadi 'dirinya' mulai dari makhluk yang disebut '*pithecanthropus erectus*' hingga '*human being*'. Maka pendidikan adalah bagian dari hidup manusia yang tidak pernah dapat dipisahkan. Tanpa pendidikan manusia tidak akan mampu mengembangkan potensi terpendam yang ada dalam setiap pribadi, yang membedakan antara makhluk manusia dengan yang lainnya. Dari sinilah kita tahu bahwa pendidikan selalu menjadi persoalan yang selalu hangat dan aktual untuk terus diperbincangkan. Namun dalam tubuh pendidikan itu sendiri terdapat seonggok persoalan yang tak pernah menemui garis akhir untuk dipecahkan. Satu persoalan selesai, muncul persoalan lain yang lebih rumit dan kompleks. Itulah gambaran persoalan pelik yang dihadapi oleh sistem pendidikan kita.

Masyarakat memang sudah lama mendambakan pendidikan yang ideal dan bermutu tinggi dan mampu diakses oleh berbagai kalangan. Namun angan-angan tinggallah angan-angan. Pada dekade ini keinginan tersebut adalah gagasan yang sangat melangit dan bersifat utopis. Dan sama sekali tidak menyentuh problematika bangsa Indonesia yang sedang terpuruk menghadapi krisis multi-dimensi yang melanda sejak tahun 1997. mulai dari krisis ekonomi, politik, budaya, bahkan yang paling ironis adalah krisis moral bangsa. Moralitas bangsa Indonesia ini sudah lama terkikis oleh perilaku "oknum yang tidak bertanggung jawab" terhadap eksistensi bangsa. Bagaimana tidak bangsa Indonesia yang baru merdeka selama lebih dari setengah abad sudah mendapatkan predikat negara terkorup kedua di dunia. Ini adalah preseden buruk bagi bangsa Indonesia.¹

Hal tersebut terbukti dengan maraknya kasus korupsi yang menjadi problem sosial, bahkan keterpurukan bangsa ini juga akibat dari merajalelanya aktivitas korupsi di Indonesia. Sektor pendidikan pun menjadi lahan yang empuk untuk melakukan aktivitas 'bejat' tersebut. Tidak hanya ditubuh pendidikan, korupsi ada mulai dari lembaga-lembaga tinggi negara sampai dengan unsur yang paling kecil yaitu keluarga. Dari sinilah timbul suatu pertanyaan yang sangat menggelitik, bagaimana para pendidik dalam mengembalikan moralitas bangsa yang sudah rusak? Serta peran pendidikan sebagai wujud agenda pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mampukah hal tersebut menjadi realitas empirik dalam sebuah kehidupan masyarakat, tanpa memilah-milah antara mereka yang kaya dengan yang tidak bermodal.

Adalah suatu kewajiban apabila menilai sistem pendidikan yang selama ini dijalankan oleh para *stakeholders* pendidikan dengan raport merah. Karena pendidikan kita selama ini bukannya mampu menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat, tapi malah sebaliknya, pendidikan malah menjadi persoalan yang amat rumit bagi masyarakat. Oleh karena itu kita perlu menyatukan barisan, dan meneguhkan niat bersama untuk membangun dunia pendidikan yang berkeadilan. Yang mengutamakan kualitas, namun tidak diskriminatif, serta menjunjung tinggi nilai-nilai egalitarianisme².

Problematika diatas tersebut yang mendasari tulisan ini. Di era pemerintahan yang serba baru ini kita perlu merekonstruksi

¹ Lihat Imam Zamroni, Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecil, dalam *Pendidikan Islam dan Tantangan Globalisasi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz-Presma Fak. Tarbiyah UIN Yogya, 2004) hlm. 204.

² H.A.R Tilaar, *Multikulturalisme; Tantangan-tantangan Global Masa Depan Dalam Transformasi Pendidikan Nasional* (Jakarta: Grasindo, 2004) hlm. 51.

tatanan pelaksanaan sistem pendidikan yang dinilai sangat ambigu dan berat sebelah. Dari sinilah kita akan mampu mewujudkan penyelenggaraan sistem pendidikan yang mampu diakses oleh semua kalangan. Oleh karena itulah, tulisan ini penting untuk direnungkan bersama. Sebagai wujud upaya untuk memberikan solusi bagi problematika dalam tubuh pendidikan tersebut.

II. Anggaran Vs Kualitas Pendidikan

Semua orang menginginkan untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dengan berbagai fasilitas penunjang pendidikan, sebagai sarana untuk mengembangkan kreativitas, dan potensi yang ada dalam peserta didik. Ini adalah janji dunia pendidikan. Namun, di negara Indonesia ini hal tersebut hanya menjadi kumpulan kata-kata indah yang sangat utopis bagi rakyatnya sendiri, karena penyelenggaraan pendidikan nasional masih jauh dari taraf idealitas. Idealnya penyelenggaraan pendidikan harus mengutamakan kualitas dan harus dapat diakses di semua kalangan, namun dalam praktiknya hal tersebut berjalan sangat timpang.

Dilihat dari kinerja pendidikan nasional sekarang masih sangat memprihatinkan, hal ini dapat dicermati dari hasil-hasil pelaksanaan pendidikan nasional yang masih jauh dari harapan. Relatif rendahnya indeks pembangunan manusia, rendahnya angka daya saing bangsa, memprihatinkannya perilaku intelektual mahasiswa dan dosen, kurang berbudayanya perilaku politik dan praktisi, merebaknya praktik korupsi di kalangan pemimpin dan pejabat, merupakan contoh konkrit dari hasil pelaksanaan pendidikan nasional yang belum memuaskan dalam jangka panjang. Dari laporan UNDP sebagai institusi inisiator dan penyelenggara survey *Human Development Index* (HDI) ternyata Indonesia hanya mampu menempati peringkat ke-102 dari 162 negara. Dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Philipina, dan Australia posisi Indonesia berada jauh di bawahnya (2001). Tentang daya saing atau *competitive index* (CI) begitu pula halnya. Berbagai lembaga internasional, misalnya *World Economic Forum* (WEF) serta *International Institute for Management Development* (IIMD) juga mendudukkan Indonesia pada posisi yang rendah. Bahkan IIMD menempatkan Indonesia di posisi ke 49 dari 49 negara (2001)³.

³ Ki Supriyoko, "Nilai-nilai Keberagaman Sebagai Titik Pangkal Upaya Pengembangan Pendidikan Nasional Indonesia di Masa Depan" (makalah yang disampaikan dalam panel forum dengan tema "Menggagas Paradigma Pendidikan Nasional dalam Era Multikultur" diselenggarakan oleh Presma Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 18 Mei 2002.

Dengan adanya data diatas kita tahu bahwa mutu pendidikan nasional memang sangat memprihatinkan, ini terbukti dengan hasil uji kemampuan membaca yang dilaksanakan oleh *The International Association for the Evaluation of Educational Achievement* (IEA) yang menunjukkan bahwa SD di Indonesia berada pada urutan ke-26 dari 27 negara peserta studi. Sementara untuk tingkat SLTP studi terhadap kemampuan matematika siswa SLTP menempatkan siswa Indonesia pada urutan ke-34 dari 38 negara, dan untuk IPA berada pada urutan ke-32 dari 38 negara peserta. Dilihat dari ukuran *Human Development Index* (HDI, 1999) mutu sumber daya manusia Indonesia juga termasuk sangat rendah⁴.

Lebih ironis lagi ketika, kualitas pendidikan di Indonesia yang rendah, namun tidak seluruh rakyat Indonesia dapat mengakses pendidikan dengan pilihan yang mereka tentukan, mereka terus dibenturkan dengan biaya pendidikan yang semakin tinggi, sehingga hanya kaum yng berkantong tebal saja yang mampu menikmati subsidi pendidikan dari pemerintah, sedangkan kaum lemah hanya mampu membayar pajak untuk negara, tetapi tidak akan pernah menikmati fasilitas yang disediakan oleh negara, khususnya dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) bagi kaum lemah masih merupakan sebuah gagasan yang sangat utopis. Selama pendidikan tidak dapat diakses oleh kaum lemah, maka mereka tidak akan keluar dari lingkaran setan kemiskinan.

Upaya untuk mengakses sektor pendidikan mempunyai korelasi terhadap pendapatan perkapita seseorang, sedangkan produktifitas sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Rumus diatas tidak hanya berlaku bagi perorangan, namun seluruh manusia yang hidup di dunia ini dihadapkan pada persoalan yang pelik tersebut. Disinilah peran negara sebagai lembaga pemerintahan yang dapat melindungi menjadi sangat krusial, terlebih lagi Indonesia dimana salah satu tujuan yang termaktub dalam UUD 1945 yaitu: mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang tidak membedakan antara suku, ras, maupun agama yang dianut oleh rakyat tersebut⁵.

Problematika pendidikan nasional merupakan akibat dai tarik ulur dua kutub kepentingan antara kutub kualitas dan kutub kuantitas, ini merupakan dua kutub yang harus terus diperhatikan

⁴ Bappenas-Depdiknas-Adicita Karya Nusa "Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah" (Yogyakarta: Adicita, 2001), hlm. xxxii.

⁵ Lihat Mansour Faqih, *Jalan Lain; Manifesto Intelektual Organik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002) hlm. xvii.

di kalangan *stakeholder* pendidikan. Idealnya sesuai dengan tantangan perkembangan zaman yang semakin kompleks, serta persaingan yang semakin tidak mengenal sekat-sekat pembatas antara negara satu dengan yang lain. Maka pengelolaan pendidikan harus didasarkan pada kualitas, namun dalam realitasnya masih banyak anak-anak yang kurang beruntung yang harus disantuni terlebih dahulu. Diantaranya yaitu mereka yang putus sekolah, dan juga yang berprestasi rendah.

Kebijakan yang diambil pemerintah tentang kewajiban sekolah sampai dengan 9 tahun untuk seluruh rakyat Indonesia, dalam hal ini tidak diimbangi dengan subsidi pendidikan yang memadai. Berbeda dengan negara Jerman, dimana warganya diharuskan memperoleh pendidikan mulai dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Tetapi kebijakan tersebut diimbangi dengan beban biaya pendidikan yang ditanggung oleh negara. Jadi, upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan bukan hanya sekedar pemutusan kebijakan yang dibebankan kepada rakyat belaka, namun negara juga turut andil untuk mensukseskan program tersebut. Di sinilah kita sebenarnya memerlukan *balancing* (penyeimbang)⁶.

III. Pendidikan Kita Anti-realitas

Terlepas dari pro kontra bahwa pendidikan kita belum menyentuh realitas empirik yang ada di sektor ekonomi. Ini terbukti dengan banyaknya pengangguran intelektual di negara inilah hal yang patut menjadi perhatian tersendiri. Kerap kali kita jumpai lulusan perguruan tinggi yang kesulitan mencari pekerjaan di sektor formal. Tidaklah ini berarti mahasiswa hanya diarahkan untuk bekerja dan bukan untuk mengembangkan potensi dirinya? Sehingga universitas hanya membentuk manusia-manusia robot yang siap menerima komando dari atasan pabrik.

Hal ini tercermin dari polling yang dilakukan oleh majalah *Balairung* terhadap mahasiswa UGM bahwa 54,8 persen dari responden mengakui bahwa perkuliahan yang mereka tekuni tidak menunjang sektor informal yang mereka geluti. Kalau mau bicara soal perkuliahan sebagai bagain dari pendidikan pastilah jadi penunjang bagi mahasiswa ketika turun ke lapangan⁷. Kita perlu

⁶ Roem Topatimasang disunting oleh Toto Rahardjo "*Sekolah itu Candu*" (Yogyakarta, Pustaka Pelajar dan INSIST, 1999) hlm. viii.

⁷ Lihat Jurnal Mahasiswa *Balairung*, Universitas Gadjah Mada Edisi 37/Th. XVIII/2004, hlm.84.

merekonstruksi paradigma berpikir klasik yang tertanam subur dalam masyarakat bahwa universitas dan gelar akademis adalah jalan satu-satunya yang harus ditempuh untuk mengubah nasib mereka, terutama anak-anak miskin. Pada kenyataannya, setelah orangtuanya di kampung terpaksa membanting tulang dan menjual sawah ladang mereka untuk membiayai pendidikan itu, anak-anak yang telah memperoleh sertifikat akademis itu harus antri dalam barisan pengangguran terpelajar yang mengemis pekerjaan. Kualitas hidup para petani dan pedagang yang tak pernah bersekolah di masa lalu mungkin lebih baik daripada anak-anak mereka yang terpelajar tapi tidak menguasai baik pengetahuan maupun ketrampilan hidup. Mereka telah terkondisikan untuk bermental kuli-budak-babu yang selalu mencari majikan baru karena takut menjadi manusia merdeka yang bertanggung jawab. Mereka sama sekali tidak menunjukkan mental swasta yang sensitive, kreatif dan berani mengambil risiko⁸.

IV. Pendidikan Dalam Nestapa Negara

Setiap negara seharusnya menjamin agar rakyat sehat, pintar, makmur. Tiga kebutuhan tersebut, bukan kebutuhan individual bagi setiap warga negara. Melainkan kebutuhan kolektif warga negara, di mana negara bertanggung jawab penuh untuk menjamin terpenuhinya tiga kebutuhan public tersebut. Kebijakan untuk memenuhi ketiga hal sering disebut kebijakan publik. Kebijakan disebut publik awalnya bukan karena diundangkan oleh negara atau berbagai lembaga tingkat dunia, tetapi perkaranya menyangkut urusan kesejahteraan bersama (*common welfare*). prasyarat untuk mencapai hal itu adalah dengan pemberdayaan melalui penyediaan peluang akses ke sumber daya. Persoalannya sekarang, dalam kenyataannya negara kita sekarang telah disandera lembaga donor, untuk menjalankan agenda yang pro dengan kapitalis global⁹.

Orientasi kebijakan negara kita sebenarnya bukan untuk memenuhi kepentingan rakyat bawah, tetapi untuk memenuhi tuntutan para kapitalis global, yang disponsori negara-negara maju, yang menggunakan WTO sebagai alat untuk mempengaruhi para kepala negara termasuk Indonesia dalam pengambilan kebijakan. Orientasi kebijakan pemerintah yang pro kapitalis mengakibatkan semua sumber daya manusia, kemampuan administrasi, dan kapital

⁸ Andrias Harefa, *Sekolah Saja Tidak Pernah Cukup* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 154-155.

⁹ Lihat Coen Husein Pontoh, *Akhir Globalisasi, dari Perdebatan Teori Menuju Gerakan Massa*, (Jakarta: C-BOOKS, 2003) hlm. 2-3.

dicurahkan untuk memenuhi tuntutan globalisasi. Globalisasi bukanlah slogan atau kata yang tidak memiliki dampak sosial, ekonomi, dan politik. Kata "Globalisasi" adalah sebetulnya terjemahan dari sistem baru dimana lalu lintas barang, jasa, dan modal tidak dikontrol oleh regulasi apapun dan tidak terbatas oleh teritori sebuah negara.

Secara struktural negara memang dikuasai para politisi. Tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan hal berbeda. Para pemilik modal yang sebenarnya berkuasa dan mengendalikan sistem suatu negara. Aset-aset negara termasuk BUMN, sumber daya alam, dan berbagai produk hukum yang disepakati oleh lembaga legislative dan eksekutif, bertujuan untuk memenuhi para kapitalis yang menghisap kekayaan bangsa Indonesia. Maka yang menjadi korban adalah program pendidikan, kesehatan publik, dan kemampuan industrial dan kewirausahaan rakyat. Kenyataan yang kita hadapi sekarang: pendidikan makin mahal hingga sulit terjangkau kelas miskin, biaya kesehatan (obat dan perawatan rumah sakit) makin mahal, dan kemampuan wirausaha rakyat makin hancur karena tidak memperoleh proteksi dari pemerintah. Untuk yang terakhir, berbagai kebijakan ekonomi baik disektor perbankan, perdagangan, investasi, dan berbagai kebijakan lainnya lebih berpihak kepada para pemilik modal besar. Para pemodal besar diberi "hadiah monopoli diberbagai sektor"¹⁰.

Secara politik, pemimpin dan pemegang kekuasaan itu dipilih oleh rakyat melalui pemilihan presiden dan wakil presiden langsung, tetapi kebijakan yang (akan) dikeluarkan lebih berpihak kepada kelompok kapitalis, bukan kepada rakyat yang memilihnya menjadi pemimpin. Para elite politik membutuhkan dana untuk membiayai berbagai aktivitas politik. Disinilah penyelewengan kekuasaan rakyat benar-benar terbuka secara kasat mata. Para pemegang kekuasaan sejak presiden soeharto sampai sekarang, kebijakannya adalah agar bisa ikut arus globalisasi kapitalis pemerintah kita mematuhi "*standard for sounds financial system*" (*banking system, prudential regulation, and good governance*) dan aturan perdagangan WTO (penghapusan bea cukai, hak milik intelektual, kemudahan memindah investasi, kelunakan aturan perburuhan, dsb). Bahkan pemerintah kita menghabiskan jutaan dollar untuk mempersiapkan

¹⁰ Lihat James Petras, *Sebuah Gambaran Tantangan Globalisasi: Peranan Negara dan Perusahaan Raksasa Internasional*, Jurnal Pembaruan Sosialisme, volume 1/Tahun 1 Juni-Juli 2000, hlm.2-4.

institusi dan tenaga ahli demi menjalankan "rule of game" globalisasi WTO itu¹¹.

Dalam bidang pendidikan, korbannya adalah pendidikan dasar yang sangat penting untuk menjamin pemerataan kepingtaran. Pemerintah lebih memperhatikan kepada pendidikan menengah atas, pendidikan tinggi. Karena dalam anggapan para kapitalis, para lulusan perguruan tinggi bisa menjadi ahli-ahli dalam mengoperasikan mesin-mesin kapitalisme, dan menjadi pemegang pos-pos strategis baik di masyarakat dan pemerintahan baik legislative maupun eksekutif yang lagi-lagi akan berpihak pada kapitalis. Sedangkan lulusan pendidikan menengah atas, akan menyuplai tenaga buruh perusahaan-perusahaan kapitalis. Memperhatikan pendidikan dasar bagi pemerintah dan kapitalis pengendali WTO tidak ada untungnya. Karena tidak bisa memberikan nilai lebih secara cepat, efektif, dan efisien. Investasi dalam pendidikan dasar terlalu lama. Secara ekonomis, hal itu merugikan. Demikianlah kebijakan pemerintah kita sekarang dan yang akan datang!¹²

Kebijakan yang pro kapitalis itu melahirkan kenyataan pahit sebagai berikut: peluang rakyat untuk mengakses sumber daya merosot tajam dengan indikasi penduduk miskin 38,4 juta (38%) (2002), pengangguran terbuka 10,13 juta; setengah menganggur 40 juta (2003), sector usaha: UKM 99,8%, sumbangan pada PDB 39,8%, UBK 0,2%, sumbangan pada PDB 60,2%. Sektor perburuhan berupa deregulasi pasar tenaga kerja: pertama, *flexible production* menimbulkan *flexible labour*. Pekerja kontrak meningkat tajam, pekerja tetap merosot. Kedua, depnaker mengabaikan fungsi penyaluran tenaga kerja (informasi dan perlindungan). Fungsinya dialihkan ke swasta. Dan ketiga urusan *collective bargaining* didesentralisasikan ke daerah (bahkan ke tingkat pabrik). Maka tidak perlu heran jika lahir istilah guru kontrak, kerja kontrak, dan angka putus sekolah akibat ketidakmampuan membiayai pendidikan meningkat setiap tahun¹³.

V. Akses Pendidikan Masyarakat Miskin

Pendidikan sebagai proses pencerdasan bukan hanya melahirkan sosok yang berpikir kritis, rasional dan maju.

¹¹ J. Robert Holton, *Globalization and Nation State* (London: Macmillan Press, 1998) hlm. 11.

¹² Coen Husein Pontoh, *Akhir Globalisasi...*, hlm.75-77.

¹³ Francis Wahono, *Teologi Pembebasan*, (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. xiv-xv.

Pembelajaran yang berlangsung dalam kelas secara tidak langsung menciptakan suatu struktur kelas di masyarakat yang berbeda dengan sebelum seorang masuk ke sebuah lembaga pendidikan. Pemahaman awam menangkap bahwa pendidikan adalah media untuk melakukan migrasi sosial, ekonomi dan politik.

Dewasa ini, pendidikan lebih diyakini sebagai suatu media atau wahana untuk menanamkan nilai-nilai moral dan ajaran keagamaan, alat-alat pembentukan kesadaran bangsa, alat meningkatkan taraf ekonomi, alat mengurangi kemiskinan, alat mengangkat status sosial, alat menguasai teknologi, serta media untuk menguak rahasia alam raya dan manusia. Direktur *London School of Economics*, Anthony Giddens menyatakan bahwa pendidikan mempunyai hubungan yang sangat kompleks dengan pemerataan. Sering pendidikan malah menghasilkan ketidakadilan dan mempertajamnya¹⁴. Seseorang penduduk dikatakan miskin, menurut Standar Internasional, jika setiap harinya tidak mampu menghasilkan 1 dollar. Penulis tidak hanya memakai standar tersebut tapi lebih makro lagi dalam arti ketidakmampuan mencukupi hak warga negara yang sangat mendasar (pendidikan dan kesehatan) secara layak untuk masyarakat Indonesia. Dalam kenyataannya, pendidikan menentukan sejauhmana akses seseorang terhadap sumber-sumber ekonomi. Secara klinis, anak yang miskin tidak bisa disamaratakan keadaannya dengan anak yang tidak miskin baik dalam taraf ekonomi, kesehatan, politik, pendidikan dan akses informasi serta ilmu pengetahuan secara umum. Buta huruf diberbagai belahan dunia didominasi oleh negara-negara yang tidak memperhatikan pendidikan dan kesejahteraan rakyatnya. Faktor sumber daya alam tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas sumber daya manusia. Indonesia yang bertanah subur, dalam kenyataannya mampu mengumpulkan angka kurang lebih tiga perlima (60%) penduduk hidup dibawah garis kemiskinan, 10-20% diantaranya hidup dalam kemiskinan absolut¹⁵. Kemiskinan secara ekonomi juga mempunyai akibat yang luas terhadap kemiskinan secara fisik, intelektual, sosial dan emosional. Secara fisik anak-anak miskin sering sakit-sakitan, kurang bersemangat, mengantuk dan lusuh. Secara sosial mereka kurang bersahabat, agresif atau sebaliknya pemalu, malas, dan rendah diri. Secara sosial mereka labil dan kurang peka pada

¹⁴ Sindunata, *Pendidikan tanpa Perasaan*, dalam majalah BASIS no. 07-08 tahun ke-51, Juli-Agustus 2002.

¹⁵ Francis Wahono, *Kapitalisme Pendidikan Antara Kompetisi dan Keadilan*, (Yogyakarta: Insist Press & Cindelas dan Pustaka Pelajar, 2002) hlm. 55-57.

kepentingan orang lain. Secara kognitif mereka lemah, kemampuan belajarnya lambat, prakarsanya kurang dan sulit berkonsentrasi.

Dengan keadaan yang cukup payah, anak miskin dalam ruang kelas memperoleh pelajaran yang sama, waktu yang sama, pekerjaan rumah yang sama, guru yang sama dan beban yang sama dengan anak-anak kelas menengah ke atas. Homogenitas pendidikan dari metodologi, kurikulum sampai cara penyampaian guru dikelas melahirkan ketimpangan yang cukup menyedihkan. Semua anak ditempatkan dengan kemampuan berpikir sama. J. Drost mengingatkan sejak tahun 1994, bahwa kurikulum 1994 hanya cocok bagi 30%siswa yang cerdas¹⁶. Anak-anak miskin ini sebelum berangkat ke sekolah membantu orang tuanya untuk mencukupi kebutuhan dan setelah pulang sekolah juga melakukan hal yang sama. Tentu waktu untuk belajar tidak sebanyak mereka yang berkecukupan secara ekonomi. belum lagi kemampuan untuk membeli buku pelajaran, bahan bacaan penambah wawasan, dan berbagai surat kabar yang menyajikan berita terbaru yang sangat membantu menambah pengetahuan serta gizi makanan setiap harinya. Maka secara ekonomi, kondisi anak miskin dalam dunia persekolahan cukup memberikan gambaran bahwa persaingan untuk memperbaiki nasib, titik berangkatnya berbeda. Tentu hasil dari proses yang berbeda tersebut melahirkan produk yang berbeda.

Dalam beberapa penelitian, terdapat temuan angka pengeluaran untuk pendidikan selalu menempati posisi teratas dibanding dengan pengeluaran unsur keperluan lain. Di sisi lain, angka putus sekolah setiap tahun semakin meningkat. Data terakhir menyebutkan bahwa angka putus sekolah mencapai 8 juta anak yang beruisa rata-rata antara 7-18 tahun. Angka tersebut didominasi anak jalanan dan ekonomi lemah, yang kemudian membawa anak ke dunia kerja. Putus sekolah bukan hanya terputus proses transformasi pengetahuan, tapi juga terampas hak-hak untuk mengembangkan potensi dan bakat anak. Dalam perspektif ekonomi, terputus sudah kesempatan untuk memperbaiki nasib dan meningkatkan kesejahteraan. Secara psikologi, perkembangan anak terganggu dan terjun dalam dunia kerja yang rawan dengan konflik dan tekanan dari majikan¹⁷.

Pembangunan yang kapitalistik menjadikan pendidikan kini bukan lagi kebutuhan sosial bagi semua warga negara, tapi

¹⁶ Ahmad Nurhasim, *Globalisasi Pendidikan dan Nasib Orang Miskin*, dalam *Pendidikan Islam dan Tantangan Globalisasi*, (Yogyakarta: ar-Ruzz, 2004), hlm. 255.

¹⁷ *Ibid.*

pendidikan menjadi kebutuhan mewah bagi sebagian besar warga negara. Mereka yang banyak dana bisa sekolah sampai puas dan bisa menikmati hidup lebih mapan. Bagi kalangan ini, kelas menengah adalah dambaan.

VI. Ketidakhadiran Tangan Negara dalam Pendidikan

Negara sebagai pihak yang berkewajiban mensejahterakan rakyatnya, tidak serta merata berfungsi sebagaimana mestinya. Bahkan dalam pengalaman kita berbangsa, sejak Indonesia merdeka sampai detik ini belum terasa pendistribusian ekonomi yang merata. Dampak negatif dari pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, melahirkan petaka kemanusiaan berupa kemiskinan, pengangguran, otoritarianisme, dan represivitas negara atas rakyatnya. Lebih celaka lagi, negara melihat warga negaranya tak lebih sekadar angka-angka statistik yang tidak bisa berbuat apa-apa. Negara sebagai kontrak sosial warga negara tidak menempatkan diri sebagai penyelamat atas kemiskinan yang diderita rakyat. Buktinya anggaran pendidikan dari tahun ke tahun terus menurun. Lebih parah lagi, gejala swastanisasi lembaga pendidikan semakin gencar. Subsidi pendidikan setiap tahun diturunkan. Subsidi kesehatan juga mengalami nasib yang sama¹⁸.

Proses disudutkannya masyarakat, yang berakibat pada meningkatnya kemiskinan dan pengangguran serta rusaknya lingkungan berjalan sudah cukup panjang dan berkelok-kelok. Proyek modernisasi yang dimulai pada tahun 1960-an melahirkan ketimpangan-ketimpangan baru. Dalam bidang ekonomi, negara kita diarahkan menuju negara industri yang memproduksi teknologi tinggi untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional. Rupanya pemerintah Orde Baru begitu terpuakau oleh kemajuan negara dunia pertama, sehingga semua jalan ditempuh untuk mengejar ketertinggalannya. Semangat untuk maju tersebut tidak memedulikan kemampuan objektif, pelestarian lingkungan, hak rakyat, dan budaya masyarakat Indonesia. Bisa dibaca bahwa pendekatan teknokrasi dalam bidang ekonomi tersebut juga berimbas pada pendidikan yang diarahkan untuk menjadi pabrik tenaga kerja yang melayani kebutuhan industri¹⁹.

¹⁸ Lihat Ariel Heryanto, *Industrialisasi Pendidikan*, dalam majalah BASIS nomor 07 tahun ke-49, Juli- Agustus 2000.

¹⁹ Eko Prasetyo, *Islam Kiri Melawan Kapitalisme Modal dari Wacana Menuju Gerakan*, (Yogyakarta: Insist Press dan Pustaka pelajar, 2002) hlm. 45-46.

Dalam kebijakan pendidikan tinggi mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pendidikan tinggi di Indonesia perlahan-lahan meninggalkan model pendidikan Belanda (misalnya gelar Drs/Drs dan berkilat pada pendidikan tinggi model Amerika Serikat [sistem, kredit dan masa pendidikan 4 tahun untuk S1]. Seperti dalam bidang ekonomi, pendidikan di Indonesia tidak saja mengalami proses industrialisasi tapi juga internasionalisasi. Dukungan dari berbagai donator asing terlihat dalam bentuk besarnya banjir beasiswa yang tersedia bagi akademikus Indonesia untuk melanjutkan studi di negara-negara Barat. Kunjungan beberapa akademisi dari negara-negara barat ke Indoneia yang berujung pada pemberian bantuan dalam bentuk kurikulum, struktur administrasi, pelatihan manajemen lembaga pendidikan, buku-buku berkualitas, teori-teori, sampai dana pembangunan gedung pendidikan adalah bentuk nyata dari proses internasionalisasi yang semakin meminggirkan mereka yang ikut terlibat dalam arus besar tersebut²⁰.

Labih lanjut Ariel Heryanto mengatakan bahwa mulai pertengahan 1990-an, dan lebih lagi pada peralihan menuju abad XXI, mahasiswa dari Asia dianggap sebagai anak-anak emas, sumber penyelamat banyak lembaga pendidikan di Barat dari bahaya kebangkrutan. Bukan karena anak-anak Asia rajin atau pandai (walau memang benar banyak diantara mereka biasanya sangat rajin, dan sebagian cerdas), tetapi karena mereka mampu mengisi kas keuangan lembaga-lembaga di Barat yang sedang menderita keringkerontang dalam bentuk biaya kuliah dan pendidikan²¹.

Meskipun pendidikan nasional selama orde baru diabdikan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi pada kenyataannya pendidikan tidak mampu membawa bangsa ini keluar dari krisis, sebaliknya memperparah krisis. Hal ini, tidak lain karena kualitas *out put* pendidikan nasional tidak mampu melahirkan individu-individu maupun bangsa yang mandiri, sebaliknya justru menjadi tergantung pada bangsa-bangsa lain. Ironi pendidikan yang demikian melahirkan masyarakat yang tergantung dengan negara.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan adanya penyimpangan dalam perencanaan dan penggunaan utang luar negeri, khususnya pada proyek-proyek sektor riil di empat departemen yang selama ini menggunakan utang luar negeri terbesar (departemen pemukiman dan prasarana wilayah, departemen energi

²⁰ *Ibid.*

²¹ Lihat Ariel Heryanto, *Industrialisasi Pendidikan*, dalam majalah BASIS nomor 07 tahun ke-49, Juli- Agustus 2000.

dan sumber daya mineral, departemen perhubungan dan departemen Pendidikan nasional). Di Departemen Pendidikan Nasional anggaran proyeknya sebesar Rp. 4,225 triliun dengan penyimpangan menurut audit BPK sebesar Rp. 54,735 milyar (Kompas, 4 September 2002)²².

Penutup

Globalisasi ekonomi berpengaruh buruk terhadap pendidikan, terutama menyangkut kesempatan akses dan pemerataan pendidikan. Oleh karena sangat dibutuhkan kebijakan yang lebih berpihak kepada kaum miskin. Bagi kelas bermodal dan kaya, negara tidak campur tangan pun sebenarnya tidak menjadi persoalan. Karena mereka secara ekonomi mampu berdiri sendiri, tanpa perlindungan dari negara. Setidaknya sangat mendesak digerakkan agar masyarakat kritis terhadap pemerintah, terkait dengan hak-hak pendidikan yang selama ini terampas oleh kebijakan negara. Dalam jangka panjang, memberikan kesempatan pendidikan bagi kelompok miskin adalah investasi untuk membangun kehidupan bangsa lebih maju. *Wallahu a'lam bi al-sawab.*

Daftar Pustaka

- Djalal, Fasli, *"Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah"*, Yogyakarta: Adicita, 2001
- Faqih, Mansour, *Jalan Lain; Manifesto Intelektual Organik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- Harefa, Andrias *Sekolah Saja Tidak Pernah Cukup* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002
- Heryanto, Ariel, *Industrialisasi Pendidikan*, dalam majalah BASIS nomor 07 tahun ke-49, Juli- Agustus 2000.
- Holton, Robert, *Globalization and Nation State*, London: Macmillan Press, 1998.
- Husein Pontoh, Coen, *Akhir Globalisasi, dari Perdebatan Teori Menuju Gerakan Massa*, Jakarta: C-BOOKS, 2003
- Jurnal Mahasiswa Balairung, Universitas Gadjah Mada Edisi 37/Th. XVIII/2004

²² Ahmad Nurhasim, *Globalisasi Pendidikan...* hlm. 257.

- Nurhasim, Ahmad, *Globalisasi Pendidikan dan Nasib Orang Miskin, dalam Pendidikan Islam dan Tantangan Globalisasi*, Yogyakarta: ar-Ruzz, 2004
- Petras, James *Sebuah Gambaran Tantangan Globalisasi: Peranan Negara dan Perusahaan Raksasa Internasional*, Jurnal Pembaruan Sosialisme, volume 1/Tahun 1 Juni-Juli 2000
- Prasetyo, Eko, *Islam Kiri Melawan Kapitalisme Modal dari Wacana Menuju Gerakan*, Yogyakarta: Insist Press dan Pustaka pelajar, 2002
- Sindunata, *Pendidikan tanpa Perasaan*, dalam majalah BASIS no. 07-08 tahun ke-51, Juli-Agustus 2002.
- Supriyoko, "Nilai-nilai Keberagaman Sebagai Titik Pangkal Upaya Pengembangan Pendidikan Nasional Indonesia di Masa Depan" (makalah yang disampaikan dalam panel forum dengan tema "Menggagas Paradigma Pendidikan Nasional dalam Era Multikultur " diselenggarakan oleh Presma Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 18 Mei 2002.
- Tilaar, H.A.R, *Multikulturalisme; Tantangan-tantangan Global Masa Depan Dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, Jakarta: Grasindo, 2004.
- Topatimasang, Roem, disunting oleh Toto Rahardjo "Sekolah itu Candu" Yogyakarta, Pustaka Pelajar dan INSIST, 1999
- Wahono, Francis *Teologi Pembebasan*, Yogyakarta: LKiS, 2000
- Wahono, Francis, *Kapitalisme Pendidikan Antara Kompetisi dan Keadilan*, Yogyakarta: Insist Press & Cindelas dan Pustaka Pelajar, 2002
- Zamroni, Imam, *Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecil, dalam Pendidikan Islam dan Tantangan Globalisasi*, Yogyakarta: Ar-Ruzz-Presma Fak. Tarbiyah UIN Yogya, 2004